



L A P O R A N

BADAN PANGAN NASIONAL

PERIODE BULAN OKTOBER

TAHUN 2024

BADAN PANGAN NASIONAL
JAKARTA, NOVEMBER
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Badan Pangan Nasional sebagai Lembaga yang terbentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, dengan dukungan alokasi anggaran sebagaimana DIPA.125.01.1.690590/2024 yang merupakan DIPA Revisi ke 16 pertanggal 4 Oktober 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 36.410.724.331.000,- dari alokasi tersebut terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp.22.131.086.000,- sehingga total alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.36.388.593.245.000,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Oktober tahun 2024 oleh unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional akan dilaporkan sebagai hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang baik di daerah dan di tingkat pusat.

Dinamikan organisasi diwarnai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diperundangkan tanggal 15 Agustus 2024 dan sejak mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162), yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peppres 83 Tahun 2024. Sebagaimana ketentuan peralihan pada pasal 55 disebutkan pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Sehingga telah diusulkan perubahan untuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Pangan Nasional dan masih dalam pembahasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan laporan kami ke depan, sangat diharapkan. Semoga Laporan Badan Pangan Nasional Bulan Oktober tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran selama bulan Oktober tahun 2024.

Jakarta, 8 November 2024
Sekretaris Utama,

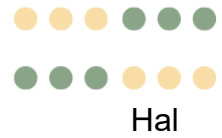
Sarwo Edhy

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan	8
1.3 Metode Penyusunan Laporan	8
BAB II. RENCANA KINERJA OUTPUT	9
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN	12
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	12
3.2 Dinamika Regulasi Terkait Badan Pangan Nasional Tahun 2024	32
3.3 Dinamika Anggaran Revisi DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2024	34
3.4 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Periode Bulan Oktober Tahun 2024	36
BAB IV. PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Permasalahan	46
4.3 Rekomendasi	46

DAFTAR TABEL



Tabel 1. Alokasi Anggaran sesuai DIPA Revisi ke-16 Badan Pangan Nasional Tahun 2024	9
Tabel 2. Pagu Blokir Per Rincian Output (RO) Badan Pangan Nasional Tahun 2024	10
Tabel 3. Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan Oktober Tahun 2024 ...	12
Tabel 4. Realisasi Fisik dan Keuangan Per Program dan Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional Bulan Oktober Tahun 2024	13

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Rata-rata Nasional Data Panel Harga di tingkat Produsen Periode Oktober, Badan Pangan Nasional Tahun 2024	16
Gambar 2. Rata-rata Nasional Data Panel Harga di tingkat Grosir Periode Oktober, Badan Pangan Nasional Tahun 2024	16
Gambar 3. Rata-rata Nasional Data Panel Harga di tingkat Eceran Periode Oktober, Badan Pangan Nasional Tahun 2024	17
Gambar 4. Total registrasi dan sertifikasi produk pangan segar	28
Gambar 5. Realisasi anggaran dan fisik (%) Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan SPHP(A); Kegiatan Pemantapan Pengendalian dan Kerawanan Pangan (B); Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (C); dan Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis dan Lainnya	30
Gambar 6. Dinamika regulasi Badan Pangan Nasional Tahun 2024	32
Gambar 7. Dinamika Anggaran Revisi DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2024	34

DAFTAR LAMPIRAN



Hal

Lampiran 1. Lampiran III DIPA Revisi ke-16 Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan	48
Lampiran 2. Realisasi Anggaran dan Fisik Badan Pangan Nasional Periode Oktober Tahun 2024	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; 3) pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan dinamika perencanaan, kegiatan tersebut dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan 57 (lima puluh tujuh) Rincian Output (RO) berdasarkan DIPA revisi 14 Nomor: SP DIPA- 125.01.1.690590/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 untuk Badan Pangan Nasional (125.01) melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 36.388.593.245.000,- yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp.36.278.209.965.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.110.383.280.000,-. Dinamika pagu alokasi untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Pangan Nasional sepanjang tahun 2024 sesuai DIPA-1 dialokasikan sebesar Rp.289.255.778.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp.22.131.086.000,-, DIPA-3 bertambah menjadi Rp.808.300.266.000,-, pada DIPA-5 alokasi anggaran bertambah untuk kegiatan bantuan pangan tahap I menjadi sebesar Rp.6.826.989.542.000,-, pada DIPA-7 alokasi anggaran menjadi Rp.15.722.461.932.000,- untuk membiayai bantuan pangan tahap I, pengembangan aplikasi Cadangan pangan, dan kegiatan pendukungnya. Pada DIPA-11 alokasi anggaran menjadi Rp.16.081.522.706.000,- penambahan untuk pembayaran penyaluran bantuan pangan daging dan telur ayam tahap II (bulan September-November) tahun 2023, dan pada DIPA-13 alokasi menjadi Rp.25.222.891.455.000,- penambahan anggaran digunakan untuk bantuan pangan tahap III tahun 2024 dan sebagaimana DIPA-16 per tanggal 4 Oktober 2024 alokasi menjadi Rp.36.410.724.331.000,-. Penambahan anggaran ini untuk pembayaran penyaluran bantuan pangan beras tahap II (bulan September-Desember tahun 2023), kekurangan pembayaran penyaluran bantuan beras tahap I tahun 2023 dan kekurangan pembayaran penyaluran beras SPHP triwulan I-III tahun 2023.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan pencapaian output kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Oktober Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Oktober Tahun 2024. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Oktober Tahun 2024 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Badan Pangan Nasional Tahun 2024 baik fisik maupun keuangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian RO kegiatan serta penggunaan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional posisi bulan Oktober Tahun 2024.
2. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian RO dan penggunaan anggaran berdasarkan targetlembar ke-III DIPA selama bulan Oktober Tahun 2024.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari kinerja outcome di level Badan Pangan Nasional untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama Tahun 2024. Keragaan pagu anggaran dan Rincian Output (RO) selama Tahun 2024 sebagaimana DIPA 125.01.1.690590/2024 edisi Revisi-16 pertanggal 4 Oktober 2024 dengan alokasi pagu sebesar Rp.36.410.724.331.000,- dan alokasi pagu blokir sebesar Rp.22.131.086.000,- sehingga alokasi pagu total yang dapat digunakan sebesar Rp.36.388.593.245.000,- dengan rincian sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.
Alokasi Anggaran Sesuai DIPA Revisi ke-16
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU DIPA	PAGU BLOKIR	PAGU REVISI
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.297.754.113.000	19.544.148.000	36.278.209.965.000
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.194.631.657.000	8.292.278.000	36.186.339.379.000
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	5.177.606.000	47.588.014.000
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	6.074.264.000	44.282.572.000
WA	Program Dukungan Manajemen	112.970.218.000	2.586.938.000	110.383.280.000
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.970.218.000	2.586.938.000	110.383.280.000
TOTAL		36.410.724.331.000	22.131.086.000	36.388.593.245.000

Dari Tabel 1 diatas, pagu blokir sebesar 6,08% dari pagu alokasi DIPA dan alokasi blokir terbesar pada kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Rencana penyerapan anggaran sesuai lembar III DIPA Revisi-16: Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dengan target pada bulan Oktober sebesar 54,51% dan sampai dengan bulan Oktober sebesar 48,99%. Untuk perhitungan realisasi anggaran sesuai dengan laporan dari aplikasi SAKTI dengan menggunakan pagu revisi diluar pagu blokir atau dari

pagu sebesar Rp. 36.388.593.245.000,-. Rincian pagu blokir per RO sebagaimana Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.
Pagu Blokir Per Rincian Output (RO)
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

RINCIAN OUTPUT (RO)	PAGU DIPAA Revisi ke-16	PAGU BLOKIR	PAGU REVISI
003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan (kegiatan)	10.982.953.000	2.789.078.000	8.193.875.000
001 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan (Data)	9.074.585.000	2.700.000.000	6.374.585.000
002 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Data)	14.920.340.000	2.803.200.000	12.117.140.000
001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan (Rekomendasi Kebijakan)	4.123.000.000	1.000.000.000	3.123.000.000
002 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Rekomendasi Kebijakan)	7.227.000.000	2.588.803.000	4.638.197.000
001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan (kegiatan)	5.700.000.000	588.803.000	5.111.197.000
001 Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan (Orang)	14.525.000.000	760.000.000	13.765.000.000
001 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan (Data)	1.275.000.000	240.000.000	1.035.000.000
001 Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Rekomendasi Kebijakan)	300.000.000	148.000.000	152.000.000
002 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan (Rekomendasi Kebijakan)	2.198.400.000	150.000.000	2.048.400.000
001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (kegiatan)	8.702.742.000	779.924.000	7.922.818.000
002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (kegiatan)	11.271.222.000	750.000.000	10.521.222.000
003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan	4.532.847.000	56.975.000	4.475.872.000

RINCIAN OUTPUT (RO)	PAGU DIPA Revisi ke-16	PAGU BLOKIR	PAGU REVISI
Standar Keamanan dan Mutu Pangan (kegiatan)			
001 NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan (NSPK)	650.000.000	185.000.000	465.000.000
001 Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (Produk)	1.712.000.000	195.525.000	1.516.475.000
001 Promosi Pangan B2SA (Kegiatan)	5.044.000.000	914.000.000	4.130.000.000
001 Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan (Kelompok Masyarakat)	2.270.000.000	330.000.000	1.940.000.000
001 Data Situasi Konsumsi Pangan (Data)	1.460.000.000	467.340.000	992.660.000
001 Sarana Keamanan dan Mutu Pangan (Unit)	8.342.800.000	2.097.500.000	6.245.300.000
001 Kerja Sama Bidang Pangan (Dokumen)	2.900.000.000	75.028.000	2.824.972.000
001 Data dan Informasi Pangan (layanan)	5.248.080.000	298.137.000	4.949.943.000
956 Layanan BMN (Layanan)	720.000.000	48.000.000	672.000.000
957 Layanan Hukum (Layanan)	1.700.000.000	108.100.000	1.591.900.000
958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	3.500.000.000	78.000.000	3.422.000.000
959 Layanan Protokoler (Layanan)	975.000.000	54.000.000	921.000.000
960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1.000.000.000	50.000.000	950.000.000
962 Layanan Umum (Layanan)	11.755.630.000	39.936.000	11.715.694.000
951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1.926.400.000	1.282.000.000	644.400.000
954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	3.600.000.000	199.664.000	3.400.336.000
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	5.923.960.000	145.377.000	5.778.583.000
965 Layanan Audit Internal (Laporan)	6.604.000.000	208.696.000	6.395.304.000
TOTAL	148.893.737.000	22.131.086.000	138.033.873.000

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Alokasi anggaran sebagaimana DIPA.125.01.1.690590/2024 Revisi ke 16 pertanggal 4 Oktober 2024, Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 36.410.724.331.000,- dari alokasi tersebut terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp.22.131.086.000,- sehingga total alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.36.388.593.245.000,-. Program, kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan output/rincian output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Oktober tahun 2024 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi Keuangan per belanja dan realisasi fisik bulan Oktober tahun 2024 per output lingkup Badan Pangan Nasional disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3.
Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan Oktober Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	48.599.711.000	42.578.137.148	80,73
2.	Belanja Barang	36.330.197.571.000	17.881.698.289.597	49,22
3.	Belanja Modal	31.927.049.000	24.127.079.845	75,56
Total		36.410.724.331.000	17.825.079.324.874	48,95

Berdasarkan Tabel 3 diatas, realisasi terbesar pada jenis belanja pegawai sebesar 80,73%, terutama yang digunakan untuk gaji dan tunjangan PNS, sedangkan realisasi terendah untuk belanja modal yang digunakan untuk kegiatan operasional, seperti belanja perkantoran, bahan makanan, pengiriman surat dinas, dan honor operasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang baik di daerah dan di tingkat pusat dengan target dan realisasi per Program dan Kegiatan sampai bulan Oktober 2024 sebagaimana Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Oktober Tahun 2024
Per Program dan Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)			Rincian Output		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.278.209.965.000	17.735.471.649.239	48,89	-	-	-
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.186.339.379.000	17.662.066.540	48,81	283.643.132	200.133.104,00	70,56
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	47.588.014.000	37.449.252.781	78,69	180.026,00	178.022,00	98,89
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	44.282.572.000	35.955.856.079	81,20	461	369	80,04
WA	Program Dukungan Manajemen	110.383.280.000	89.607.675.635	81,18	425	408	96,00
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	110.383.280.000	89.607.675.635	81,18	425	408	96,00
TOTAL		36.388.593.245.000	17.825.079.324.874	48,98	283.824.469	200.312.311,00	70,57

Dari Tabel 4 diatas realisasi tertinggi ditunjukkan pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar 81,20% dan realisasi terendah pada kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 48,81 %. Rendahnya realisasi pada kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan disebabkan karena ada fasilitasi sarana dan prasarana SPHP yang masih dalam tahap penyiapan dokumen. Selain itu ada beberapa rincian output (RO) kegiatan yang belum terealisasi yaitu RO pangan terdistribusi, RO sarana SPHP dan RO penyaluran CPP.

Untuk menjelaskan realisasi per RO dan realisasi keuangan sampai dengan bulan Oktober tahun 2024. Intervensi yang telah dilakukan sampai bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (HA. 6875).** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, diantaranya:
 - a. **Inflasi Pangan Bergejolak:** Untuk menekan laju inflasi pangan bergejolak, Badan Pangan Nasional melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, melakukan upaya melalui penyaluran bantuan pangan beras ini

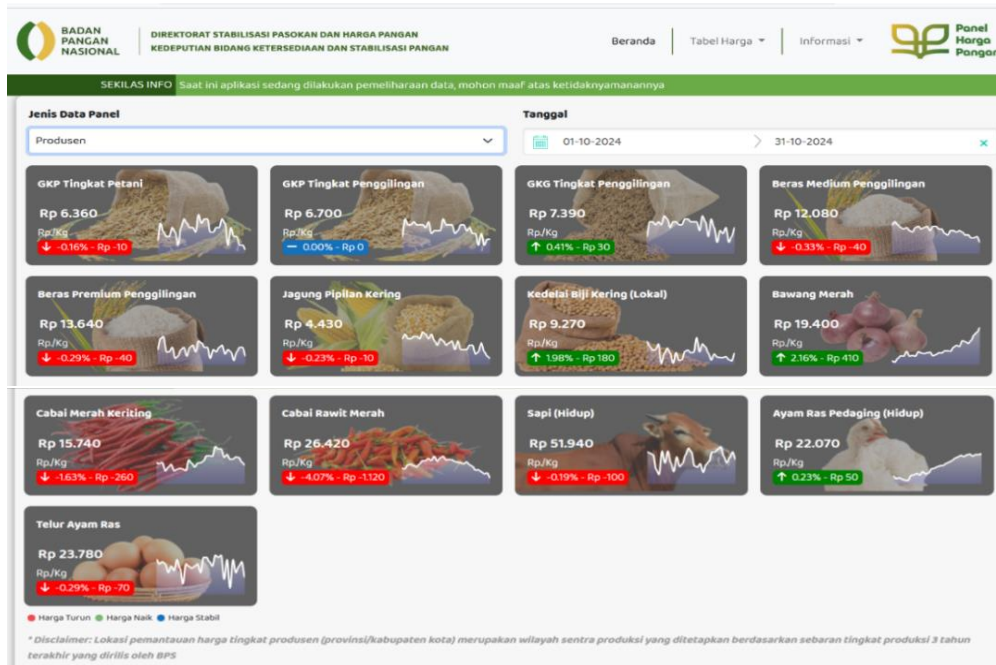
diindikasikan dapat mengurangi tekanan harga di tingkat konsumen terutama beras yang merupakan komoditas pangan pokok masyarakat. Penyaluran bantuan pangan beras ini secara langsung dapat mengurangi tekanan harga di pasar, terutama kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) tidak terdampak oleh lonjakan harga yang berpotensi menambah beban ekonomi. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton beras melalui tiga tahap. Pada tahap pertama (Januari-Maret 2024), sebanyak 659.131 ton beras disalurkan ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya tahap kedua (April-Juni 2024) sudah tercatat penyaluran sebesar 653.356 ton. Pada tahap ketiga (Agustus-Oktober 2024) telah mencapai 218.171 ton. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada September 2024 berada pada level 1,84 % (year-on-year), dengan komponen harga bergejolak seperti beras, cabai rawit, dan bawang putih yang memiliki andil inflasi sebesar 0,23 %. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi pemerintah di 1,5 % hingga 3,5 %. Melalui langkah distribusi beras yang masif, kita mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang menjadi komoditas utama dalam penghitungan inflasi.

- b. **Proyeksi Neraca Pangan.** Berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Oktober 2024, Badan Pangan Nasional memperkirakan secara keseluruhan neraca/stok pangan sampai dengan bulan Oktober 2024 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2-3 bulan ke depan. Kelimpahan stok daging ayam ras dan telur ayam ras yang ada pada saat ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Potensi ketersediaan untuk telur ayam ras dan daging ayam ras untuk kebutuhan MBG dan proyeksi daging ayam di tahun 2025-2027 masih surplus, dengan catatan pelaku usaha tidak melakukan afkir dini dan tidak ada penyakit. Terdapat kenaikan produksi daging ayam ras dan telur ayam ras di bulan Oktober karena adanya penambahan produksi anak ayam/*day old chicken* (DOC) di bulan September sebesar 8 juta ekor, sehingga proyeksi daging ayam ras dan telur ayam ras diperkirakan surplus sampai akhir tahun 2024.
- c. **Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Pusat dan Daerah.** Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah program pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Sepanjang bulan

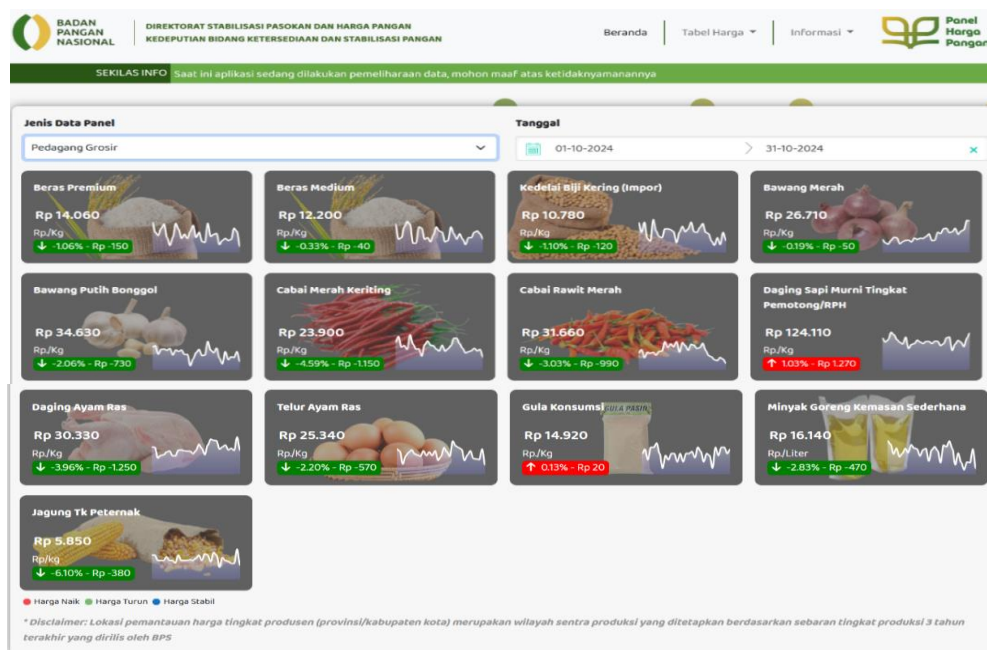
Oktober ini, salah satu yang kita gencarkan adalah GPM dan bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2024 dan mengusung tema “Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik”, yang berarti bahwa pentingnya hak asasi manusia atas pangan yang layak dan berkelanjutan. GPM dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, produsen pangan, BUMN, BUMD pangan, dan pelaku usaha pangan. GPM bertujuan untuk: a) menekan laju inflasi, b) menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, c) memitigasi dampak kenaikan harga pangan, terutama di kalangan Masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan d) membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam pelaksanaan GPM, berbagai jenis komoditas pangan ditawarkan dengan harga yang terjangkau, seperti beras, gula, minyak, telur, ikan segar, bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayur-sayuran. Selama bulan Oktober 2024, Badan Pangan Nasional menargetkan GPM Serentak di 541 titik yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, khusus pada momentum HPS yang jatuh pada 16 Oktober 2024, GPM dilaksanakan di 120 titik di pusat, 22 titik di Provinsi, dan 97 titik di kabupaten/kota. Adapun sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan GPM sebanyak 7.719 kali baik di tingkat pusat (178 kali), Provinsi (1.228 kali), maupun Kabupaten/Kota (6.313 kali).

- d. **Panel Harga Pangan.** Kegiatan Panel Harga Pangan merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala. Data yang dikumpulkan meliputi harga dan pasokan di tingkat produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran (Gambar 1). Tujuan kegiatan Panel Harga Pangan adalah: a) mengoptimalkan kualitas pendataan, b) mendukung penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan lainnya, c) menstabilkan pasokan harga pangan dan d) menggambarkan kondisi harga dan pasokan pangan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis komoditas yang terpantau di Panel Harga Pangan adalah: beras, kedelai biji kering, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai rawit merah kriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir lokal. Selain itu, ada juga komoditas lain yang terpantau di Panel Harga Pangan, seperti: minyak goreng kemasan sederhana,

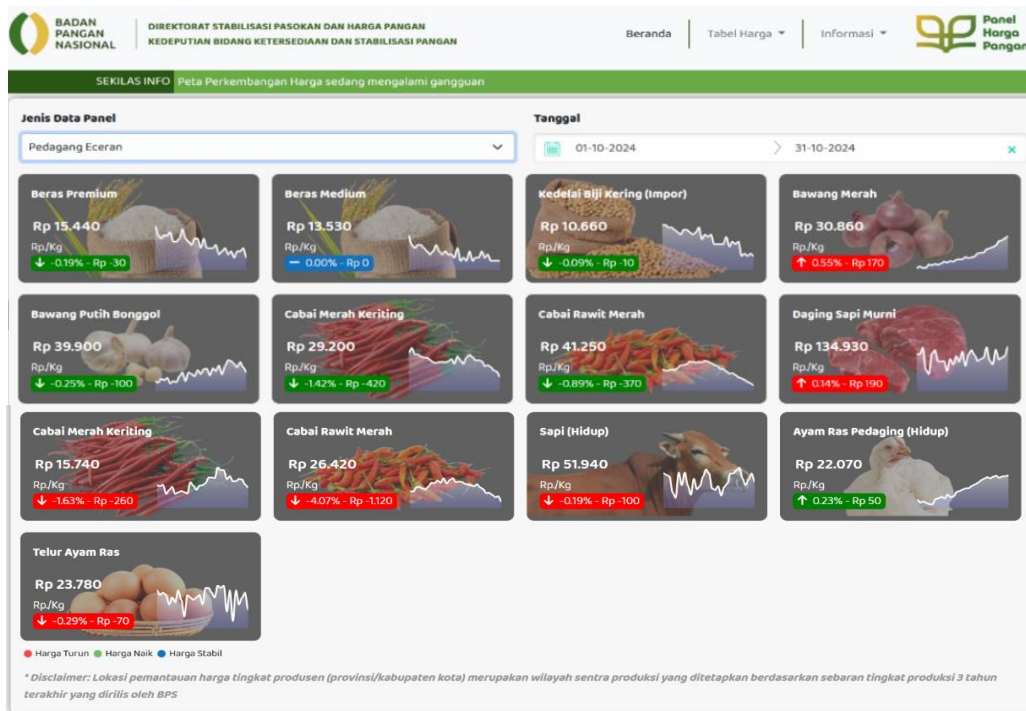
tepung terigu curah, jagung pipilan kering, minyak goreng dan tepung terigu. Perkembangan rata-rata nasional jenis komoditas yang terpantau di Panel Harga Pangan di tingkat produsen, tingkat grosir dan tingkat eceran periode Oktober 2024 dapat dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3 di bawah ini:



Gambar 1. Rata-rata Nasional Data Panel Harga di Tingkat Produsen periode Oktober 2024



Gambar 2. Rata-rata Nasional Data Panel Harga di Tingkat Grosir periode Oktober 2024



Gambar 1. Rata-rata Nasional Data Panel Harga di Tingkat Eceran periode Oktober 2024

Gambar 1, 2 dan 3 di atas menggambarkan bahwa harga bahan pangan berubah atau terjadi fluktuasi harga pada periode 1 sampai 31 Oktober 2024. Selama periode Oktober 2024 terjadi variasi harga pada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti; Gabah Kering Giling (GKG) penggilingan, bawang merah, ayam ras pedaging (hidup) dan kedelai biji kering di tingkat produsen. Daging sapi murni dan gula konsumsi terjadi kenaikan harga di tingkat grosir, sedangkan beras premium, kedelai biji kering (impor), bawang putih bonggol, cabai merah kriting, cabai merah rawit dan ayam ras pedaging (hidup) mengalami kenaikan di tingkat eceran. Untuk komoditas pangan lain mengalami penurunan dan stabil. Perubahan harga ini tercermin dari dinamika permintaan pasar, biaya produksi, dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah selama periode Oktober 2024.

- e. **Kios Pangan.** Kios Pangan dilaksanakan dalam mendukung stabilisasi harga dan pengendalian inflasi pangan, di mana BUMN pangan, Perum BULOG dan ID FOOD serta pelaku usaha pangan lainnya berperan dalam memasok kebutuhan pangan, sehingga dapat memotong rantai distribusi dan memberikan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Sampai saat ini telah ada di 412 titik yang tersebar di 21 Provinsi dan 96 Kabupaten/Kota. Ekspansi persebaran Kios Pangan

terus diupayakan Badan Pangan Nasional, karena program ini dapat menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang efektif karena dapat langsung menyentuh masyarakat. Ini juga merupakan langkah pemerintah dalam membantu masyarakat guna memastikan ketersediaan stok pangan pokok strategis dengan harga yang terjangkau.

f. Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Penyaluran CPP dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga pangan. Melalui penyaluran bantuan pangan (PBP) disalurkan kepada kelompok miskin dan rentan yang ditunjukkan dengan tingginya cakupan untuk kelompok ekonomi terbawah desil 1 sampai 4, rumah tangga rawan pangan dan lansia. Pemanfaatan bantuan pangan berbentuk beras dapat meringankan tekanan finansial PBP untuk pembelian bahan pangan, penyaluran CPP melalui PBP di rincian sebagai berikut:

- Penyaluran CPP untuk bantuan beras. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022 mengamanatkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bantuan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Bantuan pangan berupa beras diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, dimana setiap keluarga akan mendapatkan 10 Kg beras per bulan yang disalurkan dalam 3 tahap. Tahun 2024 penyaluran CPP memasuki tahap tiga yang dimulai bulan Agustus, Oktober dan Desember. Terdapat pada bulan Oktober untuk bantuan pangan beras di beberapa daerah melalui proses verifikasi dan validasi data memasuki tahap tiga yang dimulai bulan Agustus, Oktober dan Desember di beberapa daerah yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi data. 9 (Sembilan) Provinsi yang data penerimanya telah terverifikasi yaitu; Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DIY, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau. Perum Bulog terus menyerap beras dengan wilayah serapan tertinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan seluruh Pulau Sumatera. Angka serapan hingga Oktober 2024 mencapai 1,2 juta ton,

meningkat 300 ribu dibanding realisasi September 2024 yang baru mencapai 908 ribu ton. Sepanjang tahun 2024, bantuan pangan telah diberikan selama 9 bulan kepada 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran 10 kg per KPM dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap I: Penyaluran bantuan pangan beras tahap I tahun 2024 (Januari-Maret) sebesar 658.052.320 kg atau 99,67% dari alokasi sebesar 660.122.310 kg.
- Tahap II: Penyaluran bantuan pangan beras tahap II tahun 2024 (April-Juni) sebesar 651.540.290 kg atau 98,70% dari alokasi sebesar 660.122.310 kg.
- Tahap III: Penyaluran bantuan pangan beras tahap III tahun 2024 (Agustus-Desember) yang terealisasi per 26 Agustus 2024 sebesar 208,2 ribu ton atau 94,64% dari alokasi sebesar 660.122.310 kg.
- Penyaluran CPP untuk bantuan pangan Daging dan Telur Ayam Ras untuk menurunkan angka stunting, melibatkan mitra peternak mandiri kecil sebagai penyuplai produk, turut menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak. Bantuan ini dikelola oleh BUMN Pangan ID FOOD yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk distribusi dan tim satgas pangan untuk pengawasan. Produk-produk yang disalurkan dengan pengemasan dalam bentuk beku (frozen) untuk menjaga kesegaran. Penyaluran CPP bantuan pangan daging diberikan masing-masing 1 ekor daging ayam ras dengan berat 0,9-1 kg dan masing-masing 10 butir telur ayam ras untuk 1.4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan waktu penyaluran selama 6 (enam) bulan terdiri dari Tahap 1 pada Bulan Januari s.d. Maret dan Tahap 2 pada bulan April s.d. Juni. Data KRS bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Surat Kepala BKKBN Nomor 099/LP.02/G4/2024 tanggal 15 Januari 2024. Selanjutnya melalui surat Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Nomor 110/TS.03.03/B.3/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 data diserahkan kepada ID FOOD. Realisasi penyaluran alokasi Tahap I (Januari – Maret) sebanyak 659.131.140 kg atau sebesar 99,85% dari total alokasi Tahun 2024 sebesar 660.132.580 kg. Pelaksanaan penyaluran. Realisasi penyaluran alokasi Tahap II (April-Juni) telah terdistribusi sebanyak 995 ribu paket atau 69%. Penyaluran telah dilakukan di 6 Provinsi yaitu Banten sebanyak 51 ribu paket (79%), Jawa Barat 338 ribu paket (82%), Jawa Tengah 308 ribu paket (95%),

Jawa Timur 252 ribu paket (67%) serta Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sumatera Utara sebanyak 46 ribu paket (33%).

- Pelaksanaan Penyaluran Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan SPHP Jagung untuk membantu masyarakat Indonesia. Beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang BULOG memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan beras-beras jenis lain di pasaran. Hingga tanggal 18 Oktober 2024 telah disalurkan sebanyak 1.195.818 ton beras SPHP. Jenis beras untuk program SPHP ini termasuk kelas medium yang dijual dalam kemasan 5 kg oleh pedagang dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp. 62.500,-. Beras SPHP ini dijual di pasar tradisional, ritel modern dan toko lainnya yang menjadi mitra downline perum BULOG serta juga outlet perum BULOG.
- f. **Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)** bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pasokan pangan yang dibutuhkan. Penyaluran dan metode distribusi pangan dapat berbeda-beda di setiap Lokasi. Bapanas terus berupaya bergerak cepat untuk membantu para petani cabai meningkatkan harga beli cabai di tingkat petani di beberapa wilayah produsen. Melalui surat resmi yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2024, telah diumumkan Bapanas bahwa FDP ini bertujuan memberikan subsidi biaya distribusi cabai dari wilayah produsen (surplus) ke wilayah konsumen (defisit).
- g. **Penguatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin**, tujuannya untuk memperkuat distribusi logistik pangan di seluruh wilayah Indonesia terutama untuk produk pangan yang mudah rusak (*perishable food*) melalui pengembangan sarana prasarana rantai dingin (*cold chain*) sehingga tetap aman dan kualitasnya tetap terjaga. Sarpras rantai dingin yang disalurkan Bapanas antara lain *cold storage* dengan kapasitas hingga 12 ton, *air blast freezer* kapasitas hingga 3 ton, *heat pump dryer* kapasitas 200 kilogram per *batch*, dan *refeer container* kapasitas hingga 20 ton.

2. Kegiatan Pemantapan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (HA. 6876). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diantaranya:

- a. Kegiatan Gerakan Edukasi Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (GENIUS).** Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang sehat dan berdaya saing, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi anak-anak melalui pemenuhan gizi yang optimal. Salah satu langkah nyata adalah pelaksanaan Gerakan Edukasi Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (GENIUS) yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional. Kegiatan GENIUS ini merupakan wujud dukungan terhadap Gerakan Sekolah Sehat khususnya Sehat Bergizi, yaitu dengan memberikan kudapan tinggi protein hewani kepada siswa sebanyak 20 kali disertai dengan edukasi pangan dan gizi oleh perguruan tinggi melalui Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI). GENIUS yang dimulai sejak 2023 telah dilaksanakan di 243 SD Negeri di 50 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih 42 ribu siswa. Pada tahun 2024, program GENIUS menyasar sekitar 17 ribu siswa di 92 SD yang tersebar di 30 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Pemilihan lokus program ini didasarkan pada data *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*). Adapun angka PoU mengalami perubahan yang positif di mana PoU turun dari 10,21% pada 2022 menjadi 8,53% pada 2023. Melalui program Genius yang digencarkan di berbagai daerah terutama lokus yang tingkat PoU maupun status daerahnya masih rentan rawan pangan, Tahun 2024 ditargetkan penurunan PoU hingga 5%. Program ini melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan, Sekolah, orang tua dan pihak swasta untuk mewujudkan ketahanan pangan, GENIUS juga berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang dengan memperhatikan pola makan yang seimbang, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan cerdas, siap menghadapi tantangan di era mendatang.

- b. **Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP).** Intervensi pengendalian kerawanan pangan (IPKP) adalah program yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membantu keluarga rawan pangan dan mengentaskan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Program ini bertujuan untuk: a) mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga, b) mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan c) menguatkan daerah tahan pangan. Kegiatan IPKP Tahun 2024 dilaksanakan di 20 Kabupaten/Kota, 233 desa pada 8 Provinsi yakni Jambi, Kep.Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua dan dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 45.000 KK. Program ini dilakukan dengan menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10 persen terbawah atau desil 1 berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bantuan pangan yang diberikan berupa pangan segar dan olahan yang memiliki kandungan gizi dan kalori tinggi. Kegiatan IPKP diharapkan dapat mencapai target tahun 2024 turun menjadi 12%.
- c. **Kegiatan Stop Boros Pangan.** Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) untuk Pencegahan *Food Waste*: Stop Boros Pangan. Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghindari perilaku membuang dan boros pangan menjadi atensi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang secara kontinu diseminasikan. Kiprah ini demi untuk mendukung strategi intervensi pemerintah dalam penanganan Susut dan Sisa Pangan (SSP) di Indonesia. Sejak Tahun 2022 Bapanas telah melaksanakan GSP dalam upaya pencegahan dan pengurangan pangan berlebih berpotensi *food waste* melalui pemanfaatan mobil logistik pangan yang mengusung spirit '**Stop Boros Pangan**' dan dilaksanakan dalam bentuk penyaluran donasi pangan. Piloting GSP sudah diterapkan dalam lingkup Jabodetabek dan merupakan hasil kerja sama Bapanas bersama berbagai organisasi pegiat penyelamatan pangan. Pada tahun 2023 beberapa kegiatan

GSP antara lain: (a) menguatkan kolaborasi dengan 6 asosiasi dan 3 penggiat selamatkan pangan termasuk Tim Penggerak PKK (melalui PKS), (b) pengembangan aplikasi stop boros pangan, (c) rapat konsolidasi kebijakan GSP, (d) bimbingan teknis GSP, (e) Policy Dialogue dalam rangka Peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste, dan (f) sosialisasi/promosi. Hasilnya selama hampir setahun pertama implementasinya, tepatnya pada peringatan IDAFLW di September 2023 telah berhasil menyelamatkan pangan sebanyak 52.785,68 kg. Selanjutnya hingga September tahun 2024 terus meningkat dengan raihan peningkatan sebesar 36,34 % atau menjadi total akumulatif di 71.968 kg. Seterusnya Bapanas bersama pemangku kepentingan yang terkait akan terus memacu guna memasifkan GSP ini. Bapanas berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan SSP yang ditandai dengan hadirnya Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi pada *United Nation Food System Summit* (UNFSS)+2 di Roma, Italia pada tahun 2023. Kegiatan GSP di tahun 2024 adalah webinar “**Ayo Stop Boros Pangan**”, kampanye dan sosialisasi selamatkan pangan. Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam pengurangan SSP sebesar 75% pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya poin 12.3, yakni pengurangan 50% *food waste* di tingkat retail dan konsumen pada 2030, serta mendukung pencapaian *Zero Hunger* pada SDGs poin 2.

- d. **Uji Coba Makan Bergizi Gratis (MBG).** Dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (NFA) melakukan kunjungan kerja ke lokasi Uji Coba Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Institut Food Security Research (IFSR). Kegiatan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan makanan bergizi yang berkualitas serta meninjau proses pengolahan hingga distribusi makanan. Di lokasi tersebut, UPT MBG memproduksi paket makan siang sebanyak 3.313 porsi setiap hari untuk 20 sekolah, termasuk siswa SD, SMP, SMA, dan Pondok Pesantren di sekitar wilayah.

3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (HA. 6877). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, diantaranya:

a. Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Amanat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 60 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan dengan membudayakan pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Gerakan B2SA diluncurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 29 Juli 2022, bertepatan dengan hari ulang tahun Bapanas. Untuk menerapkan pola konsumsi B2SA di keluarga, masyarakat dapat memilih bahan pangan dan menyusun menu yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tujuan utama Gerakan Konsumsi Pangan B2SA adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif kepada masyarakat. Berikut beberapa kegiatan gerakan B2SA tahun 2024, diantaranya:

1. Pengembangan Desa B2SA. Kegiatan ini memiliki 3 komponen, yaitu Teras Pangan B2SA, Gerai Pangan B2SA dan Rumah Pangan B2SA, yang masing-masing komponen ini menguatkan sistem pangan dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan/konsumsi pangan yang merupakan miniatur ketahanan pangan di desa. *Teras pangan* dikembangkan atau digunakan untuk budidaya sayuran, ikan, dan juga ternak ayam yang telurnya bisa digunakan sebagai sumber protein hewani. *Gerai pangan* diarahkan untuk menjual hasil panen dari masyarakat kita sehingga memberikan manfaat ekonomis. Sementara *Rumah Pangan B2SA* berfungsi sebagai sarana intervensi langsung kepada sasaran dalam rangka penurunan stunting dan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan dengan menu pangan B2SA berbasis kearifan local. Rumah Pangan B2SA; Kegiatan ini dilakukan di 175 titik lokasi desa prioritas di 38 Provinsi di Indonesia.
2. Sosialisasi dan edukasi B2SA; Kegiatan ini merupakan komitmen Bapanas untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, aktif, dan produktif.
3. *B2SA Goes to School*: Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat terutama anak-anak kita baik di sekolah maupun pesantren akan pentingnya

diversifikasi pangan dan juga makan makanan bergizi seimbang. Siswa juga diperkenalkan konsep “**Isi Piringku**” yang menekankan pentingnya mengonsumsi pangan dengan porsi seimbang pada setiap kali makan, termasuk memilih sayuran, buah, protein, dan karbohidrat berkualitas dari sumber pangan yang tersedia di sekitar. Upaya ini dianggap sejalan dengan misi pemerintah dalam mengurangi angka stunting di Indonesia. B2SA Goes to School tahun 2024 dilaksanakan pada 380 sekolah yang berbeda dan tersebar di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

4. Kampanye Makan Enak, Makan Sehat, Makan B2SA.

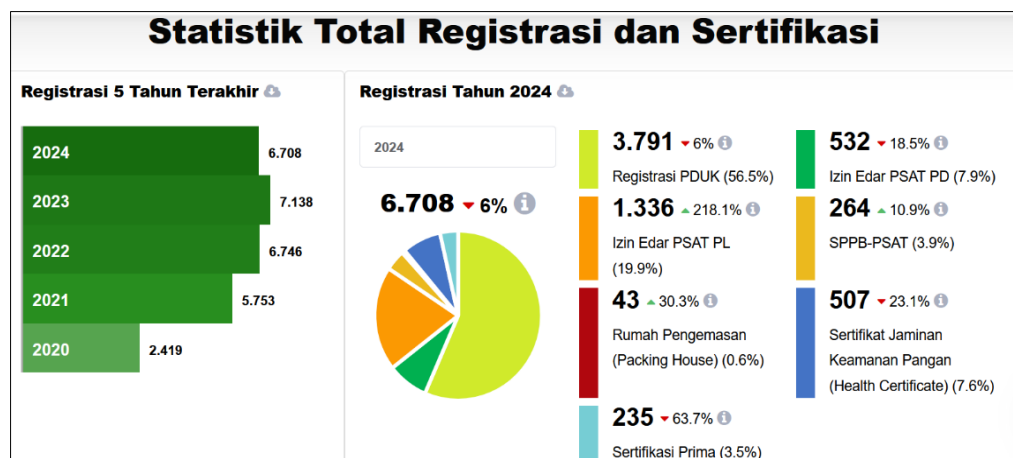
5. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional

- b. **Pengawasan Keamanan Pangan Segar.** Keamanan pangan merupakan *share responsibility* yang merupakan urusan semua pihak disepanjang rantai pangan, baik itu pemerintah, pelaku usaha, distributor, pedagang, maupun konsumen. Keamanan pangan bertujuan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Untuk menjaga keamanan pangan, pemerintah berkewajiban menjaminnya sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam mewujudkan sistem pengawasan keamanan pangan nasional tersebut maka penguatan simpul sinergi dan kolaborasi dengan Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) menjadi sangat penting dilakukan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerbitkan beberapa peraturan terkait keamanan dan mutu pangan yang selanjutnya dapat menjadi tools bagi pihak yang berkaitan dengan urusan keamanan pangan dalam melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan di daerah, Bapanas terus memperkuat sistem pengawasan keamanan dan mutu pangan melalui penyusunan standar baik dalam bentuk regulasi/ standar maupun pedoman lainnya. Standar yang disusun ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mewujudkan sistem perdagangan yang adil dan bertanggungjawab. Pengawasan persyaratan pangan segar dilakukan terhadap, a) Keamanan Pangan Segar; b) Mutu Pangan Segar; c) Gizi Pangan Segar, d) Label Pangan Segar; dan e) Iklan Pangan. Bapanas juga telah menerbitkan beberapa regulasi untuk menjamin keamanan pangan segar di peredaran, diantaranya terkait Label Pangan Segar dalam Perbadan Nomor 1 Tahun 2023, Perbadan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap

Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar, Perbadan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemar pada Pangan Segar serta terkait Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah yang tertuang dalam Perbadan 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Budan Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. Setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam upaya pengendalian keamanan pangan. Prinsip keamanan pangan *from farm to table* perlu terus kita kampanyekan. *If it is not safe, it is not food*. Berikut adalah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan oleh Bapanas tahun 2024, diantaranya:

1. Penetapan prioritas pengawasan berdasarkan risiko. Prioritas ini ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti karakteristik pangan segar, tingkat konsumsi, dan kondisi kesehatan masyarakat.
 2. Pengawasan keamanan pangan segar melalui pelaksanaan kegiatan registrasi, pengawasan, promosi di bidang keamanan dan mutu pangan.
 3. Surveilans Keamanan Pangan Segar (Pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian, pengolahan data, dan pelaporan).
 4. Penentuan objek pengawasan, seperti jenis pangan segar, jumlah, target pengawasan, dan sarana pengambilan sampel.
 5. Pemantauan dan pengujian terhadap pangan segar asal hewan dan tumbuhan.
 6. Penyusunan Rancangan Perbadan Standar dan Pengawasan Pangan Segar di Daerah
- c. **Registrasi dan Sertifikasi Produk Pangan Segar.** Registrasi produk pangan adalah proses untuk mendapatkan izin edar agar produk dapat dipasarkan secara sah di Indonesia. Registrasi produk merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan yang dijual.
- Setiap produk, baik lokal maupun impor, perlu melalui proses registrasi yang sesuai dengan jenis dan sifat produknya. Beberapa jenis produk yang perlu dilakukan registrasi, di antaranya: Produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan produk pangan asal hewan (PSAH).

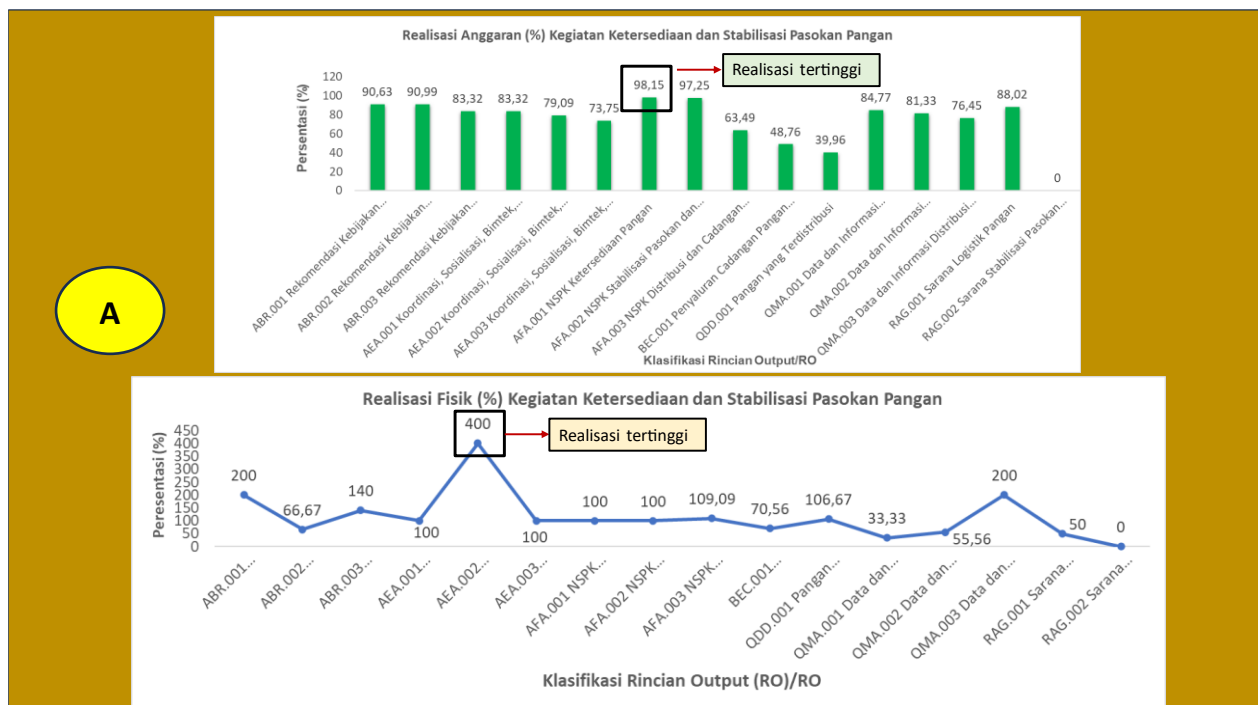
Registrasi dan sertifikasi PSAT dan PSAH oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bertujuan untuk memastikan produk aman, berkualitas, dan memenuhi standar Kesehatan. Tahun 2024, Bapanas memberikan sertifikat penilaian kepada Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah menunjukkan kinerja baik dalam menerapkan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar. Penghargaan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia 2024. Beberapa OKKPD yang menerima penghargaan tersebut adalah: OKKPD Provinsi Aceh, OKKPD Provinsi D.I Yogyakarta, OKKPD Provinsi Sulawesi Selatan, OKKPD Provinsi Sumatera Utara. Registrasi 5 tahun terakhir mencatat tahun 2023 merupakan registrasi pangan segar terbanyak (7.138) dibanding registrasi tahun 2024 yaitu 6.708 atau 6% dengan registrasi terbanyak ada pada Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), yakni izin yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengedarkan pangan segar dalam kemasan eceran, sedangkan. registrasi terbanyak per bulan tertinggi ada pada bulan Juli, yaitu sebanyak 815 dan tercatat sampai dengan bulan Oktober 2024 adalah 747 Sertifikat Izin Edar Pangan Segar. Total registrasi dan sertifikasi selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



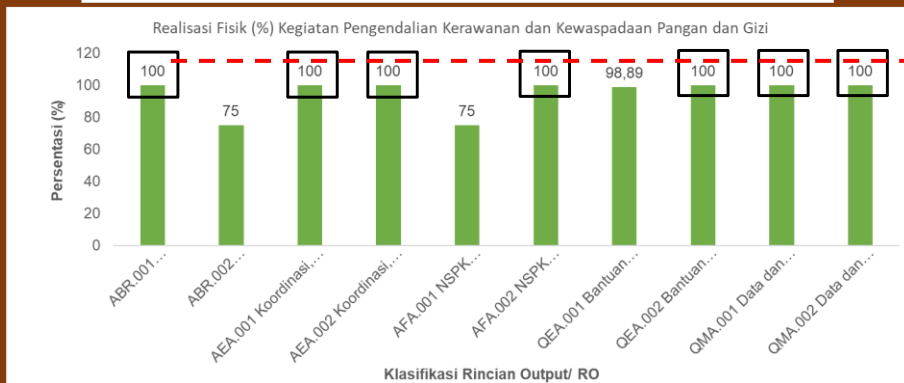
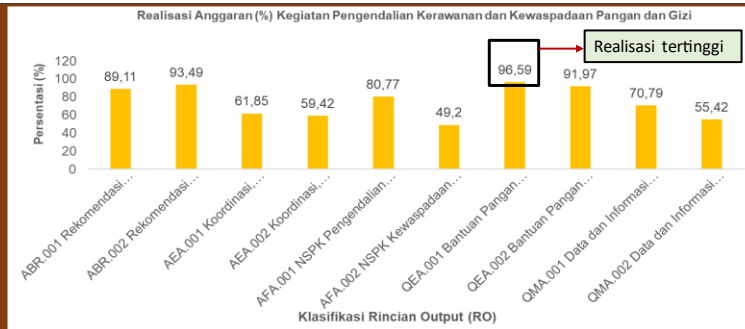


Gambar 4. Total registrasi dan sertifikasi produk pangan segar

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP) telah melakukan audit lapang ke pelaku usaha atas permohonan untuk menerbitkan izin edar Sertifikat SPBB-PSAT 9 kali. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana uraian kegiatan prioritas Badan Pangan Nasional tahun 2024 di atas, dijabarkan pula dukungan atas pencapaian dari program/kegiatan beserta target dan realisasinya baik realisasi anggaran maupun realisasi fisik yang ditunjukkan pada Gambar 5 di bawah ini.

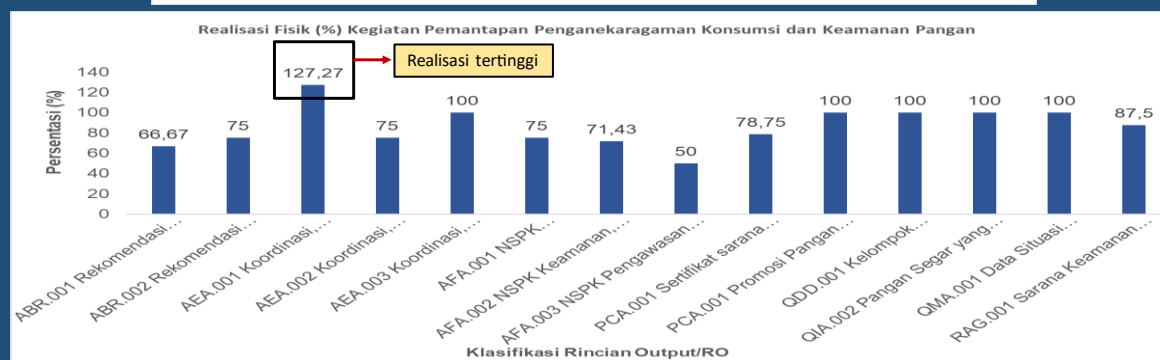
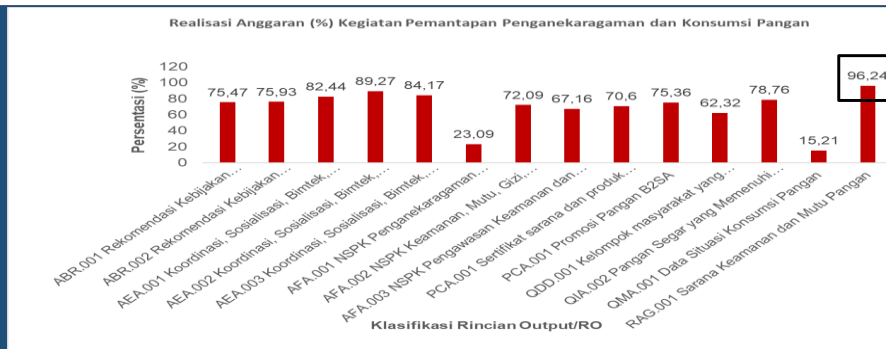


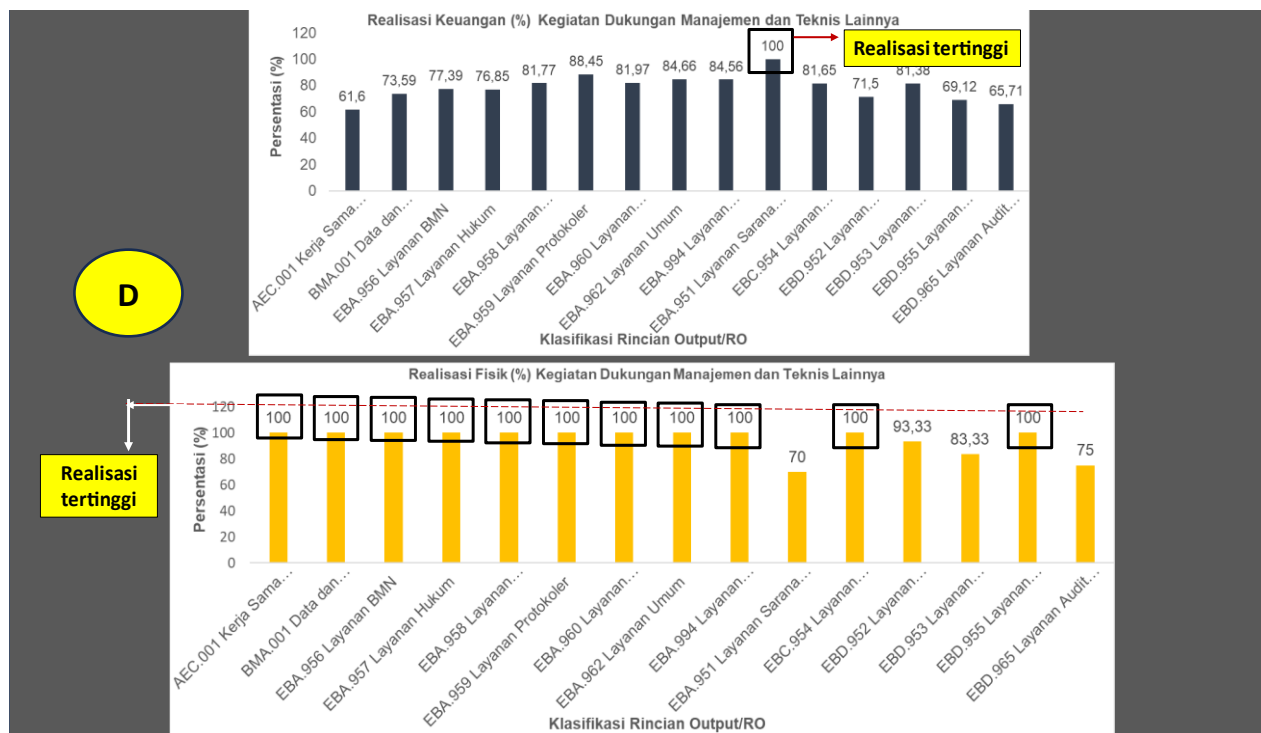
B



Realisasi Tertinggi

C





Gambar 5. Realisasi Anggaran dan Fisik (%) Kegiatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan (A); Kegiatan Pengendalian Kerawanan dan Kewaspadaan pangan (B); Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (C); dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya (D)

Gambar 5 di atas menunjukkan pemantauan pelaksanaan realisasi anggaran dan fisik oleh masing-masing unit kerja Eseleon I lingkup Badan Pangan Nasional selama periode bulan Oktober 2024. Pemantauan ini meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemantauan dilakukan untuk Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO) Kegiatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Secara umum realisasi keuangan tertinggi ditunjukkan pada program WA6874 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya sebesar 100% masing-masing untuk RO AEC001, BMA001, EBA956, EBA957, EBA957, EBA 959, EBA960, EBA962, EBC954 dan EBD 955, sedangkan realisasi fisik tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 400% pada RO AEA002 Koordinasi, Sosialisasi

Bimtek, Monev dan Pelaporan SPHP yang melampaui target dari 1 terealisasi menjadi 4 sehingga capaiannya sebesar 400%.

Target fisik yang belum terealisasi sampai periode Oktober 2024 adalah pada Kegiatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, khususnya pada RO RAG002 Sarana SPHP, yang mana target yang ditetapkan sebesar 5 unit kendaraan SPHP, namun belum ada realisasi (masih 0). Hal ini disebabkan karena masih dilakukan modifikasi di karoseri dan proses lelang dan masih menunggu persetujuan pimpinan untuk desain kendaraan, sehingga prosesnya panjang dan belum dapat tercapai sampai pada Oktober 2024, namun diperkirakan dapat direalisasikan pada November 2024.

3.2. Dinamika Regulasi Terkait Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Dalam rangka implementasi pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Pangan Nasional, diperlukan regulasi guna memberi kepastian hukum kepada pemangku kepentingan terhadap suatu isu, kebijakan strategi dalam perkembangan pembangunan di bidang pangan. Dinamika regulasi yang ada sejak keberadaan/pembentukan organisasi Badan Pangan Nasional pada tanggal 29 Juli 2021 sampai sekarang terus mengalami perubahan berdasarkan arah kebijakan dan peraturan baik yang berlaku di Kementerian Pendayagunaan Aparatur-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) maupun peraturan pendukung lainnya. Regulasi dimaksud telah tertuang baik dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Dinamika Regulasi Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Penjabaran definisi Pangan, kewajiban dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan tingkat nasional, daerah dan perseorangan serta dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional dibentuk Lembaga Pemerintahan yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden telah diatur dalam UU No.18 Tahun 2022 tentang Pangan yang disahkan pada tanggal 16 November 2012. Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur terkait Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi Masyarakat, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, perdagangan panga, bantuan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan dan gizi serta peran masyarakat telah dijelaskan dalam PP Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2015. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2017, Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2021. Perpres yang

mengatur terkait jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) maupun jenis pangan pokok tertentu, telah tertuang dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2024. Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, tanggal 15 Agustus 2024. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Surat MenPANRB Nomor: B/1265/M.KT.01/2024 tentang Tanggapan Atas Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 23 September 2024, memuat Usulan Revisi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) mengacu pada Peraturan Badan (Perbadan) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang OTK Badan Pangan Nasional. Saat ini Badan Pangan Nasional masih menunggu persetujuan/penetapan OTK Badan Pangan Nasional dari KemenPANRB.

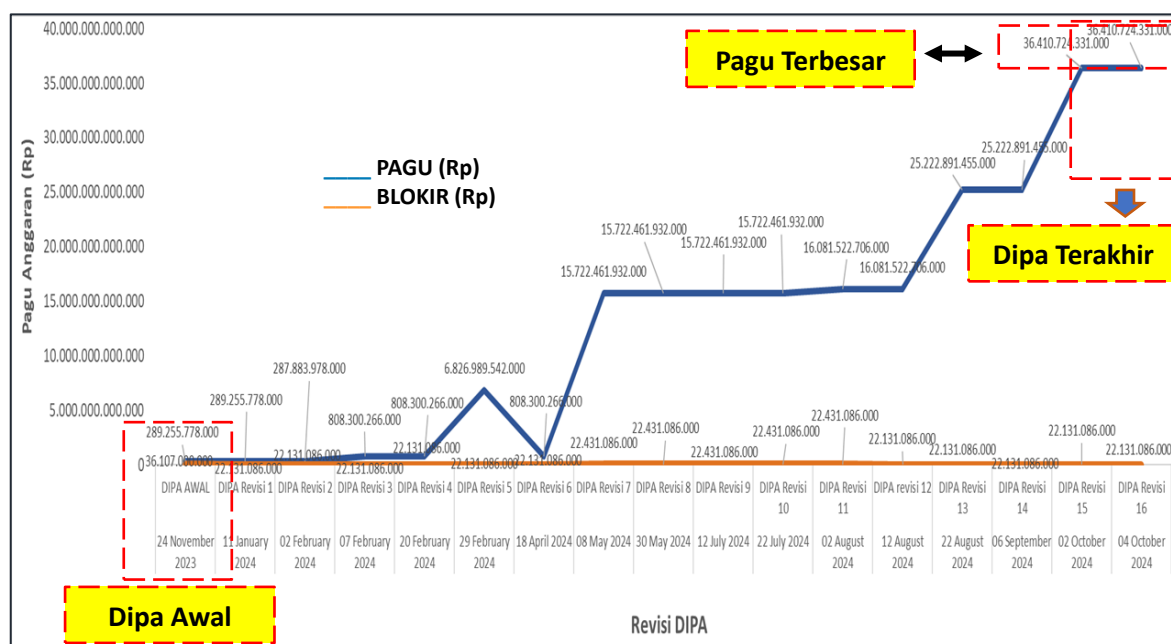
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tanggal 15 Oktober 2024, menjabarkan pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: Lembaga Pemerintahan non Kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan kecuali ditentukan lain oleh Presiden. Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2024, menjelaskan lebih lanjut dalam pasal 30 yang berbunyi: Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 mengoordinasikan :

- a. Kementerian Pertanian
- b. Kementerian Kehutanan
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- e. Badan Pangan Nasional
- f. Badan Gizi Nasional

g. Instansi Lain yang Dianggap perlu

3.3. Dinamika Anggaran Revisi DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024, Badan Pangan Nasional menerima DIPA awal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 289.255.778.000. DIPA awal ini kemudian direvisi sebanyak 16 kali sampai periode awal Oktober 2024. Revisi DIPA dilakukan berdasarkan tata cara revisi anggaran, yakni seluruh aktivitas penyelesaian revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dimulai dari diterimanya usulan revisi anggaran dari Unit Kerja Eselon (UKE) I Kementerian/Lembaga sampai dengan ditandatanganinya surat pengesahan atau surat pengembalian atau surat penolakan revisi anggaran oleh Direktur Jenderal Anggaran. Dinamika Anggaran Revisi DIPA Badan Pangan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.



Gambar 7. Dinamika Anggaran Revisi DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Gambar 7 di atas menggambarkan dinamika revisi DIPA Badan Pangan Nasional sepanjang tahun 2024 mengalami perubahan signifikan dari dipa awal yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 289.255.778.000,- menjadi Rp. 36.410.724.331.000 pada tanggal 4 Oktober 2024. Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dijelaskan secara rinci dinamika pagu sesuai DIPA-1 (11 Januari 2024)

dialokasikan sebesar Rp.289.255.778.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp.22.131.086.000,-. Terjadi pengurangan anggaran pada revisi DIPA-2 (2 Februari 2024) menjadi 287.883.978.000 untuk revisi antar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), revisi antar satker, revisi anggaran pusat dan dekonsentrasi, serta revisi antar jenis belanja (penambahan belanja modal). Revisi DIPA-3 (7 Februari 2024) bertambah menjadi Rp.808.300.266.000 untuk pembayaran penyaluran bantuan program daging ayam dan telur ayam Tahap I 2023 dan revisi DIPA-4 pada Halaman III DIPA dan revisi kegiatan (belanja sewa, perjalanan luar negeri, pengembangan aplikasi Simonstok, fasilitasi Kesehatan dan honor tim klasifikasi PPH). Selanjutnya pada DIPA-5 (29 Februari 2024) alokasi anggaran bertambah menjadi sebesar Rp.6.826.989.542.000,- untuk penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam tahap I Februari-Maret Tahun 2024 dan bantuan pangan beras Tahap I Februari-Maret 2024. Selanjutnya pada DIPA-7 (8 Mei 2024) alokasi anggaran menjadi Rp.15.722.461.932.000,- untuk pembayaran penyaluran 1) bantuan pangan beras Tahap I Februari-Maret 2024, 2) bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahap II April-Juni 2024, 3) bantuan pangan beras Tahap II April-Juni 2024 sebesar Rp. 9.050.830.060.000 serta revisi dalam rangka reuiu penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), 4) pengembangan aplikasi CPP, 5) penguatan SDM Badan Pangan Nasional, 6) honorarium Outsourcing dan 6) perjalanan luar negeri serta kegiatan pendukung lainnya. Revisi DIPA kembali dilakukan pada DIPA-11 (2 Agustus 2024) alokasi anggaran menjadi Rp.16.081.522.706.000 untuk pembayaran penyaluran bantuan pangan daging dan telur ayam tahap II (bulan September-November) tahun 2023 dan revisi pada DIPA-13 (22 Agustus 2024) alokasi menjadi Rp. 25.222.891.455.000,- untuk bantuan pangan beras tahap III (Agustus, Oktober dan Desember) tahun 2024 sebesar Rp. 9.141.373.749.000,- dan selanjutnya revisi DIPA-16 (4 Oktober 2024) untuk pembayaran bantuan pangan beras Tahp II Tahun 2023, kekurangan bantuan pangan Tahap I Tahun 2023 dan kekurangan SPHP Triwulan I s.d. III Tahun 2023 sebesar Rp. 11.187.832.876.000 sehingga total alokasi anggaran menjadi Rp. 36.410.724.331.000. Penambahan ini guna mendukung program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

Revisi DIPA dilakukan dengan alasan antara lain, pertama, tenggat waktu yang cukup lama, sekitar satu tahun antara proses perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran, sehingga mungkin saja banyak kebutuhan tahun anggaran

berkenaan yang belum tercakup dalam perencanaan yang disusun setahun sebelumnya. Dalam kondisi demikian, para pengguna anggaran harus mampu menyesuaikan kembali anggaran yang telah tertuang dalam DIPA untuk mengakomodir hal tersebut agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala dalam masalah pendanaan. Selain itu, adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan yang semula telah direncanakan secara luar jaringan (luring) ternyata cukup dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau kegiatan yang semula diperkirakan hanya *single year*, ternyata dalam pelaksanaannya menjadi harus berubah menjadi *multiyears* dan yang semisalnya. Berikutnya, yaitu perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan seperti penghematan anggaran atau kebijakan lain sebagai respons atas kondisi perekonomian nasional. Hal ini sering terjadi setiap tahun, terutama pada saat pengajuan APBN-Perubahan dan pemotongan anggaran dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran serta yang terbaru kebijakan *automatic adjustment* (AA) atau pencadangan anggaran.

3.5. Kegiatan Kepala Badan Periode Bulan Oktober 2024

1. Penyaluran Bantuan Pangan Beras

Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi bersama Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono melakukan giat di Gudang Bulog Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, tanggal 2 Oktober 2024. Giat ini dilakukan dalam rangka kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada warga di NTT.



Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia serta mengendalikan inflasi pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas pangan pokok bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya

intervensi bantuan pangan untuk menjaga tingkat inflasi pangan. Penyaluran banpang beras ini sudah sesuai rencana di tahap III, yaitu di bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024. Adapun stok beras di Gudang Bulog Kampung Baru mencapai 1.292,54 ton. Sebanyak 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bantuan pangan beras dalam kesempatan tersebut. Penyaluran ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang telah berjalan sejak awal tahun.

Kepala Badan Pangan Nasional turut menyampaikan pandangannya terkait inflasi. Menurutnya, upaya pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah strategis yang efektif dalam menekan laju inflasi, terutama di sektor pangan. Sejak awal tahun, Badan Pangan telah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dengan berbagai langkah pengendalian, salah satunya melalui penguatan CPP. Melalui langkah distribusi beras yang masif, kita mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang menjadi komoditas utama dalam penghitungan inflasi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa langkah penyaluran bantuan ini menjadi kunci dalam mengurangi tekanan harga di pasar dapat juga menekan inflasi di sektor pangan.

Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton beras melalui tiga tahap. Pada tahap pertama (Januari-Maret 2024), sebanyak 659.131 ton beras disalurkan ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya tahap kedua (April-Juni 2024) sudah mencatatkan penyaluran sebesar 653.356 ton. Pada tahap ketiga (Agustus 2024) telah mencapai 218.171 ton. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada September 2024 berada pada level 1,84 persen (year-on-year), dengan komponen harga bergejolak seperti beras, cabai rawit, dan bawang putih yang memiliki andil inflasi sebesar 0,23 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi pemerintah di 1,5 hingga 3,5 persen.

Lebih lanjut, Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil seperti Kabupaten Sumba Barat. Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan upaya menjaga angka inflasi secara berkelanjutan.

2. Diskusi Panel Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menghadiri acara diskusi panel Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2024. Bapak Arief optimis bahwa program MBG ini dapat semakin menggerakkan ekonomi dan memberi dampak lanjutan yang positif bagi kesejahteraan petani dan peternak lokal. Menurut



Kepala Bapanas, kedepan tidak ada lagi yang buang-buang cabai, telur atau ayam, akibat saking berlebihnya stok, nanti dapat diserap MBG dan dampaknya baik, apalagi jika nanti full speed sampai 82, 5 juta orang per hari, bahkan sampai dua kali per hari. Hal ini dapat mengakibatkan daerah rentan rawan pangan semakin berkurang dan Tingkat stunting juga bisa turun sampai 1 digit.

Menurut Arief, pemenuhan program hilirisasi seperti MBG perlu mengutamakan pasokan dalam negeri. Dengan itu akan berimplikasi pada akselerasi kesejahteraan produsen tanaman pangan di dalam negeri. Terlebih menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di 2023 jumlah usaha petani perorangan tanaman pangan mencapai 15,7 juta atau 89 persen dari total 17,5 juta. Selebihnya bergerak di tanaman hortikultura dan perkebunan. Rerata pendapatan pertanian perorangan di 2023 pun mengalami eskalasi hingga 4 kali lipat dibandingkan 2021. Di 2023, menurut BPS, rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun. Sementara di 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Sebagai penutup, Kepala Bapanas menyampaikan bahwa kedepannya, bukan sebuah transisi pemerintahan, tapi ini adalah keberlanjutan. Bapanas mendukung dan membantu Badan Gizi Nasional, misalnya dalam mempersiapkan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola). Kepala Bapanas Arief meminta segenap stakeholder pangan saling bersinergis dan untuk BUMN pangan dapat semakin diperkuat peranannya terkait Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar fokus pada produksi yang banyak dan cadangan pangan juga. Kita perpanjang masa simpan pangan dengan sarana prasarana cold chain. Ini sudah kami lakukan, Dalam MBG, Bapanas sudah usulkan agar ada aspek keberagaman yang berbasis pangan local (ada dalam Perpres 81 tahun 2024). Jadi nanti saat memberikan pangan bergizi, itu bisa disesuaikan dengan local source. Misalnya di Indonesia Timur itu sumber proteinnya ikan, jadi pakai ikan saja untuk proteinnya, tidak harus daging.

3. Seminar Internasional “*Food Security in Indonesia and Malaysia*”



Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi hadir sebagai pembicara pada Seminar Internasional “***Food Security in Indonesia and Malaysia***” yang dilaksanakan oleh alumni University Putra Malaysia (UPM) pada tanggal 11 Oktober 2024 di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Arief, tantangan global seperti

perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas pangan serta ancaman krisis pangan membutuhkan pendekatan kolektif dan kerjasama lintas negara, terutama di Kawasan Asia Tenggara. Diharapkan kolaborasi regional, berbagai pengetahuan, teknologi dan sumberdaya adalah kunci untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Arief menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, terutama dalam aspek memperkuat perdagangan komoditas pangan serta membangun mekanisme yang lebih efisien dalam mendukung rantai pasok pangan regional. Bapanas berharap kedepan, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia semakin berkembang dan saling menguntungkan, terutama di sektor pangan. Melalui peningkatan volume perdagangan komoditas seperti beras, bawang merah dan produk pangan lainnya, kita dapat saling melengkapi kebutuhan dalam kawasan. Arief juga menyampaikan, peran para alumni UPM, khususnya Warga Negara Indonesia, sangat penting dalam mendorong terbangunnya kerja sama antardua negara serumpun. Selaras dengan itu, Guru Besar UPM, Normaz Wana Binti Ismail mengakui dinamika global seperti perang di Ukraina, perubahan iklim, dan El Nino harus diwaspadai kaitannya dengan stabilitas pangan di Malaysia. Semangat kolaborasi dalam menciptakan ketahanan pangan di setiap negara harus terbangun. Ia juga menekankan pada peningkatan produksi pangan dalam negeri dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Menurutnya, penerapan *smart farming* dapat memberikan solusi terhadap peningkatan produksi di tengah tantangan ketersediaan lahan dan peningkatan populasi.

Sementara itu, General Manager National Farmers Organization (NAFAS), sebuah badan usaha berbentuk koperasi yang bergerak di sektor pertanian di Malaysia, Encik Muhammad Faris mengungkapkan Malaysia mengimpor berbagai komoditas pangan dengan nilai total mencapai angka 78,7 miliar ringgit. Sementara nilai ekspor di sektor pangan sekitar 46,4 miliar ringgit. Untuk itu,

pihaknya terbuka untuk membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan tujuan bersama mewujudkan perdagangan di sektor pangan yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi berpandangan, ekspor dan impor pangan merupakan sesuatu yang biasa dalam perdagangan pangan. Indonesia mengimpor beberapa komoditas pangan dan pada saat yang sama juga mengekspor komoditas pangan yang memang berlebih dan menjadi produk unggulan di beberapa negara.

Khusus untuk 12 pangan pokok strategis yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), basisnya pada perhitungan neraca pangan nasional yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional Bersama Kementerian/lembaga terkait. Produk pangan pokok strategis itu kita hitung berapa ketersediaan dan kebutuhannya. Setelah itu, kita petakan mana yang sufficient dan mana yang tidak sufficient, sehingga manakala keputusan impor dilakukan, itu telah berdasarkan perhitungan yang terukur dan tetap memperhatikan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Hal ini selaras dengan visi swasembada pangan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden menggagas dalam 4 tahun sejak menerima mandat pada tanggal 20 Oktober nanti, bahwa Indonesia akan swasembada pangan Kembali seperti dahulu, artinya jika konsumsi pangan dalam negeri telah mampu dipasok dari produksi domestik, namun masih ada stok lebih, kita bisa lakukan ekspor.

4. Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) Harga Kedelai Petani Jawa Tengah

Pemerintah mendorong potensi dan sumber daya produk pangan Indonesia dapat meningkat dan mengisi kebutuhan pasar yang tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dapat merambah ke pasar internasional. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, bahwa terus mendorong komoditas pangan yang memang produksinya surplus di dalam negeri agar



dapat berekspansi dan memenuhi kebutuhan pasar internasional. Seperti bawang merah, kita lihat dapat di ekspor dari Indonesia ke Malaysia dan beberapa negara lainnya. Ini tentu menjadi harapan kita bahwa Indonesia bisa menjadi produsen pangan dunia. Hal ini disampaikan usai mengikuti Seminar Internasional **“Food Security in Indonesia and Malaysia”** pada Tanggal 12 Oktober 2024 di KBRI, Kuala Lumpur Malaysia.

Menurut proyeksi neraca pangan nasional yang disusun Badan Pangan Nasional, Indonesia merupakan negara produsen bawang merah dengan produksi tahunan mampu mencapai 1,35 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi dalam setahun sebesar 1,16 juta ton. Ini artinya masih terdapat surplus sekitar 186 ribu ton. Lebih lanjut, pada tahun 2023 Indonesia memiliki 3,5 juta rumah tangga usaha pertanian yang mengandalkan hortikultura sebagai usaha utama. Komoditas sayuran yang masih menjadi unggulan hortikultura antara lain bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kubis, kentang, dan tomat. Ini mengacu pada selama 2023, yang menjadi penyumbang produksi terbesar kategori sayuran adalah bawang merah dengan 13,59 persen. Dengan itu, bawang merah telah menjadi komoditas hortikultura yang mempunyai potensi ekspor, termasuk ke wilayah ASEAN. Thailand menjadi negara ASEAN terbanyak yang menerima ekspor bawang merah dari Indonesia sebanyak 6 ribu ton dengan nilai transaksi mencapai 8 juta USD pada tahun 2023. Sementara ekspor bawang merah Indonesia ke Malaysia terus mengalami eskalasi yang progresif. Pada 2021, jumlahnya masih berada di angka 59,6 ton. Kemudian terus digenjut sampai pada 2023 mengalami peningkatan mencapai 10 kali lipat menjadi 612,8 ton.

Mengutip data Kementerian Pertanian, selama kurun waktu 2019 sampai 2023, Indonesia sebagai negara eksportir bawang menempati urutan ke-33 dalam lingkup global. Rerata nilai ekspor 2019-2023 sebesar USD 9,46 juta per tahun. Ini mengalami kenaikan yang impresif sebesar 44,87 persen jika dibandingkan pada kurun waktu 2017-2021 yang kala itu Indonesia masih berada di urutan ke-35 dengan rerata USD 6,53 juta per tahun.

5. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Cabai

Strategi mobilisasi stok pangan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang telah diterapkan Badan Pangan Nasional selama ini, semakin dipacu dari hari ke hari dengan tujuan agar stok pangan yang melimpah di daerah sentra produsen dapat dialihkan ke daerah yang mengalami defisit stok atau harga sedang meninggi. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi saat



giat FDP SPHP Cabai di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024 menyampaikan bahwa selain mobilisasi stok cabai melalui FDP, Badan Pangan Nasional juga akan mendorong kepada Kementerian/Lembaga agar para ASN-nya bantu serap dengan berbelanja cabai langsung dari produsen. Sampai minggu pertama Oktober 2024, realisasi FDP khusus cabai totalnya telah mencapai 36.840 kilogram (kg) yang terdiri dari Cabai Merah Keriting (CMK) 31.686 kg dan Cabai Rawit Merah

(CRM) 5.154 kg. Sebagaimana informasi yang dihimpun dalam 'Rakor SPHP Cabai', terdapat 3 daerah sentra cabai yang sedang panen raya yang totalnya bisa mencapai 200 ton per hari. Ketiga daerah ini merupakan penyumbang pasokan cabai merah besar hingga 50 persen ke pasaran. Adapun 3 daerah ini adalah Banyuwangi yang kisaran panen cabainya dapat mencapai 100 ton per hari, kemudian Jember dan Probolinggo masing-masing dapat menghasilkan cabai 50 ton per hari. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), cabai termasuk komoditas sayuran yang jadi penyumbang produksi terbesar pada 2023, yakni cabai besar (10,64 persen), cabai rawit (10,31 persen), dan cabai keriting (7,94 persen).

Capaian FDP cabai tahun 2024 mengalami peningkatan tajam sampai 66,8 persen jika dibandingkan FDP tahun sebelumnya. Pada FDP cabai sampai akhir Desember 2023 yang lalu, total realisasinya ada di angka 22.085 kg yang terdiri dari CMK 16.817 kg dan CRM 5.268 kg. Dengan itu, FDP cabai ke depannya akan didorong agar mampu merambah hingga ke wilayah Papua, menimbang masih cukup banyak kabupaten/kota di sana yang mengalami melonjaknya harga CMK dan CRM di tingkat konsumen.

6. Hari Pangan Sedunia (HPS) 2024

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi hadir di momentum Hari Pangan Sedunia (HPS) di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2024. HPS diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Menurut Kepala Bapanas, pemenuhan hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. "Hak atas pangan tidak hanya mencakup ketersediaan bahan pangan, tetapi juga aksesibilitas, keberlanjutan, dan pemerataan dalam distribusi pangan. Masyarakat juga harus mendapatkan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup yang lebih baik, sehingga bisa sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan tema yang diusung The Food and Agriculture Organization (FAO) dalam World Food Day/Hari Pangan Sedunia Tahun 2024, yaitu 'Right to Foods, For a better Life and a Better Future' atau 'Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik'. Kepala Bapanas, Arief menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia, dalam hal ketahanan pangan. Perubahan iklim, kekeringan ekstrem, ketergantungan pada satu sumber pangan, serta gangguan rantai pasok global menjadi ancaman yang harus diwaspadai terhadap ketahanan pangan nasional.



Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber pangan yang sangat beragam, harus mampu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, terutama beras. Kita harus mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti jagung, sagu, umbi-umbian, dan sorgum. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan kita dengan menggencarkan

penganekaragaman pangan dan pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan

Pak Prabowo Subianto juga konsen dengan pangan, khususnya terkait pencapaian swasembada pangan. Untuk itu, pemerintah melalui Bapanas, Kementerian/Lembaga terkait serta seluruh pemangku kepentingan terus berupaya memperkuat ketahanan pangan. Selain menggencarkan panganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, Bapanas juga terus melakukan berbagai insiatif dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Bantuan pangan (banpang) beras saat ini masih digencarkan di mana terdapat 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia yang masing-masing mendapatkan 10 kilogram (kg) beras untuk satu kali penyaluran. Bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam dalam mendukung penurunan stunting juga diberikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi.

Untuk memastikan pemerataan distribusi pangan yang mampu menjangkau seluruh daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi tumpuan bagi masyarakat. Dalam momentum HPS 2024, NFA bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan BUMN pangan serta para pelaku usaha melakukan GPM Serentak di 120 titik di pusat, 22 provinsi, dan 97 kabupaten/kota. Adapun total target GPM sepanjang Oktober 2024 ini mencapai 541 titik di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa indikator terkait ketahanan pangan yang mampu menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2024, prevalensi stunting nasional mengalami penurunan sebesar 9,3 persen dari 30,8 persen menjadi 21,5 persen. Lalu hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2024 juga menunjukkan perbaikan di mana jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan menurun dari 74 Kabupaten/Kota menjadi 62 Kabupaten/Kota. Sedangkan, berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), kualitas konsumsi pangan juga mengalami kenaikan sebesar 1,2 poin dari 92,9 menjadi 94,1. Ini mengga/mbarkan semakin tinggi skor PPH, menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat mengarah ke semakin beragam dan bergizi seimbang.

7. Diskusi Sorgum oleh Wanita Tani HKTI

Suasana peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dalam penyampaian sebagai pembicara kunci dalam diskusi bertajuk ‘Sorgum: Sumber Pertumbuhan Baru Untuk Ketahanan



Pangan’ yang diadakan Wanita Tani HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di Jakarta, pada Rabu 16 Oktober 2024. Bapak kepala Bapanas menekankan bahwa tantangan pangan yang diusung dalam HPS tahun ini memiliki relevansi yang erat dengan kondisi Indonesia. Faktor

geografis dan demografis menghasilkan kompleksitas tersendiri bagi ketahanan pangan nasional, namun di balik tantangan pelik tersebut, Indonesia memiliki biodiversitas terbesar kedua di dunia, sehingga potensi pangan pokok alternatif seperti sorgum, penting untuk terus didiseminasikan secara luas kepada masyarakat.

Tema HPS tahun ini, hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Bagi Indonesia ini sangat relevan. Jumlah penduduk kita saat ini sudah 280 juta, terdiri dari 17 ribu pulau yang setiap daerah punya karakteristik climate yang berbeda-beda, sehingga kita punya kompleksitas yang luar biasa, namun jangan dilupakan bahwa biodiversity Indonesia itu terbesar kedua di dunia, sehingga sebenarnya kesempatan kita untuk meningkatkan ketahanan pangan itu terbuka lebar, termasuk sorgum untuk sumber karbohidrat selain beras. Di Indonesia Timur itu sangat memungkinkan ditanami sorgum secara luas. Ini karena sorgum tidak perlu banyak air seperti halnya padi. Jadinya sumber karbohidrat masyarakat bisa pula dari sorgum. Terkait biodiversitas yang dimiliki Indonesia, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia adalah negara dengan kekayaan biodiversitas tertinggi kedua di dunia dan bisa dikatakan sebagai negara megabiodiversitas. Di 2022, Indonesia memiliki skor 0,614 dan Brasil menempati tertinggi pertama dengan skor 0,772. Sementara dalam himpunan data Bapanas, di Indonesia total terdapat 945 biodiversitas pangan. Ini terdiri dari 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber protein, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 40 jenis bahan minuman, 26 jenis kacang-kacangan, dan 110 jenis rempah dan bumbu. Terkait sorgum, jika menilik kandungan gizinya, bisa dikatakan sorgum memiliki kandungan energi, protein, lemak, dan serat yang lebih tinggi dibandingkan beras dan terigu. Sorgum pun lebih mudah dicerna sehingga cocok bagi penyintas obesitas, diabetes melitus, dan diet karbohidrat. Dalam 100 gram sorgum bisa mengandung energi 366 kilokalori (kkal); karbohidrat 73 gram; protein 11,0 gram; lemak 3,3 gram; dan serat 1,2 gram.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Oktober Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang dijabarkan dalam 27 jenis KRO dan 57 output/RO dengan pagu total berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional Revisi ke-16 Tahun 2024 sebesar Rp. 36.410.724.331.000,- yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen.
2. Sesuai dengan dinamika anggaran, Badan Pangan Nasional telah melakukan revisi DIPA sebanyak 16 kali sejak DIPA awal diterima yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 289.255.778.000,- sampai per tanggal 4 Oktober 2024 sebagai penetapan revisi DIPA ke-16 (terakhir) yang dialokasikan sebesar Rp. 36.410.724.331.000,- untuk pembayaran bantuan pangan beras Tahp II Tahun 2023, kekurangan bantuan pangan Tahap I Tahun 2023 dan kekurangan SPHP Triwulan I s.d. III Tahun 2023. Alokasi ini merupakan alokasi anggaran terbesar untuk periode Oktober 2024. Penambahan ini guna mendukung program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
3. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024 sebesar Rp. 17.825.079.324.874,- dengan persentase realisasi sesuai pagu DIPA Revisi , sebesar 48,99%. Sedangkan realisasi pada bulan Oktober Tahun 2024 untuk satker Badan Pangan Nasional mencapai Rp. 11.216.511.107.987,- atau mencapai 30,82% dari pagu DIPA Revisi. Sedangkan jika dibandingkan dengan pagu DIPA sebesar Rp. 36.410.724.331.000,- realisasi sebesar 48,95%.
4. Belum terealisasinya target (fisik) pencapaian KRO dan Output/RO RAG 002 Sarana SPHP sampai bulan Oktober Tahun 2024, dimana target yang ditetapkan sebesar 5 unit kendaraan SPHP, namun belum terealisasi (masih 0) disebabkan karena masih dilakukan modifikasi di karoseri dan proses lelang dan masih menunggu persetujuan pimpinan untuk desain kendaraan,

sehingga prosesnya panjang dan belum dapat tercapai sampai pada Oktober 2024, namun diperkirakan dapat direalisasikan pada November 2024.

5. Belum terealisasinya bantuan pangan beras tahap III disebabkan karena masih perlunya pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi untuk proses reviu bantuan pangan beras tahap I dan tahap II, sehingga proses penyaluran bantuan pangan beras tahap III menjadi tertunda.
6. Sesuai dengan dinamika regulasi, Badan Pangan Nasional masih menunggu SOTK Badan Pangan Nasional terkait tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional yang dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

4.2 Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Oktober Tahun 2024 terdapat permasalahan masih rendahnya realisasi anggaran lingkup Badan Pangan Nasional pada bulan Oktober Tahun 2024 disebabkan karena :

1. Adanya anggaran tambahan untuk pembiayaan bantuan pangan Tahap II (September-Desember) tahun 2024, sehingga tahapan kegiatannya menjadi lebih banyak yang menyebabkan realisasi anggarannya menjadi lebih kecil.
2. Pemblokiran anggaran pada DIPA Induk Badan Pangan Nasional.
3. Pengalokasian dan pencairan anggaran untuk Bantuan Pangan tahun 2024 menunggu persetujuan Presiden.
4. Minimnya SDM, administrasi pelaksana kegiatan di Satker di provinsi yang menyebabkan keterlambatan dalam membuat laporan.
5. Keterbatasan kapasitas SDM kompeten dalam pengelola keuangan maupun SDM teknis, berdampak pada perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

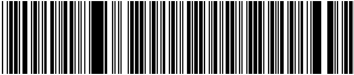
1. Melakukan percepatan realisasi anggaran untuk mendukung target realisasi dengan penetapan rencana aksi dan pemantauan realisasi capaian serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Perlunya mengoptimalkan kompetensi dan profesionalisme SDM di bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Memastikan tindak lanjut kepada KemenPANRB atas usulan perubahan SOTK Badan Pangan Nasional terkait tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1.
Lampiran III DIPA Revisi ke-16: Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9667-3789-4107-8928

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.428.037	15.128.587	386.894.753	15.215.428	17.179.089	24.405.766	23.665.110	6.085.074.306	34.636.835	19.845.837.078	24.323.731	9.932.935.630	36.410.724.331
		BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.785.811	3.847.895	3.847.895	3.847.895	2.064.711	48.569.711
		BELANJA BARANG	4.015.474	11.049.139	379.368.221	10.996.170	13.077.548	16.303.416	19.469.241	6.080.867.745	16.053.334	19.835.620.244	17.588.350	9.925.788.660	36.330.197.571
		BELANJA MODAL	48.746	694.730	329.122	181.612	292.313	485.667	399.847	420.750	14.735.606	6.368.940	2.887.486	5.082.229	31.927.049
		125.01.HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.209.515	2.101.172	371.762.286	3.256.379	3.047.063	5.257.199	3.025.171	6.062.601.534	11.870.532	19.829.351.057	6.406.062	9.893.743.686	36.194.631.657
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.194.398	2.065.456	371.571.896	3.198.690	3.000.043	5.022.302	2.944.264	6.062.468.006	3.181.501	19.823.310.770	3.937.118	9.892.686.413	36.175.580.857
		53 BELANJA MODAL	15.116	35.716	190.390	57.689	47.020	234.897	80.907	133.528	8.689.031	6.040.287	2.468.944	1.057.273	19.050.800
		125.01.HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	86.451	2.005.328	2.657.745	1.992.225	1.846.956	3.981.675	7.698.023	8.822.902	4.127.519	3.153.890	3.587.247	12.805.659	52.765.620
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	84.605	1.969.931	2.603.362	1.978.268	1.823.240	3.956.753	7.633.694	8.746.403	4.070.577	3.040.368	3.462.553	12.489.416	51.859.170
		53 BELANJA MODAL	1.846	35.397	54.384	13.957	23.716	24.922	64.328	76.499	56.942	113.522	124.694	316.244	906.450
		125.01.HA.6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	855.006	2.972.430	1.348.511	1.641.118	3.428.866	3.128.726	3.407.354	4.945.481	9.935.840	3.587.900	3.787.519	11.318.086	50.356.836
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	834.198	2.889.480	1.315.549	1.599.370	3.322.095	3.033.621	3.283.720	4.817.404	4.070.981	3.458.133	3.598.459	9.098.826	41.321.836
		53 BELANJA MODAL	20.808	82.950	32.962	41.748	106.771	95.105	123.634	128.077	5.864.858	129.767	189.059	2.219.260	9.035.000
		125.01.WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.277.066	8.049.637	11.126.209	8.325.706	8.856.203	12.038.167	9.534.563	8.704.389	8.702.945	9.744.231	10.542.903	15.068.199	112.970.218
		51 BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.785.811	3.847.895	3.847.895	3.847.895	2.064.711	48.569.711

Lampiran 2.
Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Oktober Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI
Kementerian Keuangan

URAIAN	PAGU NON BLOKIR REVISI KE-16	OKTOBER (54,51%)	OKTOBER	s.d OKTOBER	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	36.388.593.245.000	19.847.485.832.828	11.216.511.107.987	17.825.079.324.874	48,99%	18.563.513.920.126
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.278.209.965.000	19.785.905.766.996	11.204.469.740.777	17.735.471.649.239	48,89%	18.542.738.315.761
HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.186.339.379.000	19.729.693.716.231	11.195.862.678.318	17.662.066.540.379	48,81%	18.524.272.838.621
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.075.798.000	2.221.717.490	416.498.795	3.552.446.103	87,16%	523.351.897
ABR.001 Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	966.718.000	526.957.982	48.803.700	876.097.090	90,63%	90.620.910
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.119.080.000	610.010.508	63.780.395	1.018.221.287	90,99%	100.858.713
ABR.003 Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.990.000.000	1.084.749.000	303.914.700	1.658.127.726	83,32%	331.872.274
AEA Koordinasi	15.868.048.000	10.169.999.383	1.298.471.093	12.129.101.520	76,44%	3.738.946.480
AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	406.850.000	221.773.935	13.160.000	338.980.270	83,32%	67.869.730
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	7.267.323.000	3.961.417.767	426.517.008	5.747.517.270	79,09%	1.519.805.730
AEA.003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.193.875.000	5.986.807.680	858.794.085	6.042.603.980	73,75%	2.151.271.020
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.901.375.000	1.581.539.513	155.660.990	2.454.696.404	84,60%	446.678.596
AFA.001 NSPK Ketersediaan Pangan	499.375.000	272.209.313	22.283.700	490.145.813	98,15%	9.229.187
AFA.002 NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	709.720.200	86.515.727	1.266.131.564	97,25%	35.868.436
AFA.003 NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	599.610.000	46.861.563	698.419.027	63,49%	401.580.973
BEC Bantuan Produk	36.123.470.353.000	19.690.903.689.420	11.187.837.875.946	17.612.383.504.892	48,76%	18.511.086.848.108
BEC.001 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	36.123.470.353.000	19.690.903.689.420	11.187.837.875.946	17.612.383.504.892	48,76%	18.511.086.848.108
QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.500.000.000	817.650.000	52.116.000	599.340.716	39,96%	900.659.284
QDD.001 Pangan yang Terdistribusi	1.500.000.000	817.650.000	52.116.000	599.340.716	39,96%	900.659.284
QMA Data dan Informasi Publik	20.073.805.000	13.942.025.426	699.894.494	16.468.729.487	82,04%	3.605.075.513
QMA.001 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	6.374.585.000	4.946.556.284	168.615.994	5.403.762.080	84,77%	970.822.920
QMA.002 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12.117.140.000	8.133.077.334	531.278.500	9.855.472.157	81,33%	2.261.667.843
QMA.003 Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.582.080.000	862.391.808	0	1.209.495.250	76,45%	372.584.750
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.450.000.000	10.057.095.000	5.402.161.000	14.478.721.257	78,48%	3.971.278.743
RAG.001 Sarana Logistik Pangan	16.450.000.000	8.966.895.000	5.402.161.000	14.478.721.257	88,02%	1.971.278.743
RAG.002 Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	1.090.200.000	0	0	0,00%	2.000.000.000
HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	47.588.014.000	28.762.539.462	4.310.538.048	37.449.252.781	78,69%	10.138.761.219
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.761.197.000	6.186.885.000	659.133.321	7.119.275.369	91,73%	641.921.631
ABR.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.123.000.000	2.247.447.300	464.783.711	2.782.872.275	89,11%	340.127.725
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.638.197.000	3.939.437.700	194.349.610	4.336.403.094	93,49%	301.793.906
AEA Koordinasi	18.706.217.000	10.517.715.402	2.161.435.084	11.239.428.345	60,08%	7.466.788.655
AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.111.197.000	3.107.070.000	765.704.067	3.161.193.716	61,85%	1.950.003.284
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	13.595.020.000	7.410.645.402	1.395.731.017	8.078.234.629	59,42%	5.516.785.371

AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	978.450.000	533.353.095	30.754.711	607.684.970	62,11%	370.765.030
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	218.040.000	26.256.711	323.061.055	80,77%	76.938.945
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	578.450.000	315.313.095	4.498.000	284.623.915	49,20%	293.826.085
QEA	Bantuan Masyarakat	17.851.550.000	10.145.155.905	828.818.887	17.054.353.219	95,53%	797.196.781
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	13.765.000.000	7.917.577.500	220.379.687	13.296.042.419	96,59%	468.957.581
QEA.002	Bantuan Pangan dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	2.227.578.405	608.439.200	3.758.310.800	91,97%	328.239.200
QMA	Data dan Informasi Publik	2.290.600.000	1.379.430.060	630.396.045	1.428.510.878	62,36%	862.089.122
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.035.000.000	695.002.500	144.547.679	732.709.940	70,79%	302.290.060
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	684.427.000	485.848.366	695.800.938	55,42%	559.799.062
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	44.282.572.000	27.449.511.304	4.296.524.411	35.955.856.079	81,20%	8.326.715.921
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.200.400.000	1.361.877.840	622.711.826	1.670.065.544	75,90%	530.334.456
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	152.000.000	163.530.000	0	114.720.000	75,47%	37.280.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	2.048.400.000	1.198.347.840	622.711.826	1.555.345.544	75,93%	493.054.456
AEA	Koordinasi	22.919.912.000	13.358.662.676	1.811.909.906	19.691.100.616	85,91%	3.228.811.384
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.922.818.000	4.743.864.664	659.658.722	6.531.564.361	82,44%	1.391.253.639
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	10.521.222.000	6.143.943.112	825.352.573	9.392.063.833	89,27%	1.129.158.167
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.475.872.000	2.470.854.900	326.898.611	3.767.472.422	84,17%	708.399.578
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.065.000.000	1.226.475.000	244.873.581	1.250.910.883	60,58%	814.089.117
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	465.000.000	354.315.000	6.371.770	107.356.770	23,09%	357.643.230
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.400.000.000	763.140.000	238.501.811	1.009.237.215	72,09%	390.762.785
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	200.000.000	109.020.000	0	134.316.898	67,16%	65.683.102
PCA	Perizinan Produk	1.516.475.000	933.211.200	97.215.389	1.070.649.086	70,60%	445.825.914
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.516.475.000	933.211.200	97.215.389	1.070.649.086	70,60%	445.825.914
PEH	Promosi	4.130.000.000	2.749.484.400	538.895.405	3.112.564.278	75,36%	1.017.435.722
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	4.130.000.000	2.749.484.400	538.895.405	3.112.564.278	75,36%	1.017.435.722
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.940.000.000	1.237.377.000	416.616.665	1.208.933.315	62,32%	731.066.685
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	1.940.000.000	1.237.377.000	416.616.665	1.208.933.315	62,32%	731.066.685
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.272.825.000	1.238.916.908	485.959.094	1.789.966.860	78,76%	482.858.140
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.272.825.000	1.238.916.908	485.959.094	1.789.966.860	78,76%	482.858.140
QMA	Data dan Informasi Publik	992.660.000	795.846.000	62.724.425	150.983.585	15,21%	841.676.415
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	992.660.000	795.846.000	62.724.425	150.983.585	15,21%	841.676.415
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.245.300.000	547.660.000	15.618.120	6.010.681.912	96,24%	234.618.088
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	6.245.300.000	547.660.000	15.618.120	6.010.681.912	96,24%	234.618.088

W A	Program Dukungan Manajemen	110.383.280.000	61.580.065.832	12.041.367.210	89.607.675.635	81,18%	20.775.604.365
	WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	110.383.280.000	61.580.065.832	12.041.367.210	89.607.675.635	81,18%	20.775.604.365
	AEC Kerja sama	2.824.972.000	1.580.790.000	123.252.319	1.740.235.050	61,60%	1.084.736.950
	AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan	2.824.972.000	1.580.790.000	123.252.319	1.740.235.050	61,60%	1.084.736.950
	BMA Data dan Informasi Publik	4.949.943.000	2.860.728.408	589.564.847	3.642.436.517	73,59%	1.307.506.483
	BMA.001 Data dan Informasi Pangan	4.949.943.000	2.860.728.408	589.564.847	3.642.436.517	73,59%	1.307.506.483
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	83.427.742.000	45.682.529.588	9.257.400.393	70.300.034.490	84,26%	13.127.707.510
	EBA.956 Layanan BMN	672.000.000	392.472.000	54.770.034	520.092.044	77,39%	151.907.956
	EBA.957 Layanan Hukum	1.591.900.000	926.670.000	421.026.160	1.223.311.770	76,85%	368.588.230
	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.422.000.000	1.907.850.000	360.075.991	2.798.139.697	81,77%	623.860.303
	EBA.959 Layanan Protokol	921.000.000	531.472.500	198.069.260	814.648.163	88,45%	106.351.837
	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	545.100.000	134.838.065	778.719.603	81,97%	171.280.397
	EBA.962 Layanan Umum	11.715.694.000	6.407.993.913	1.933.524.751	9.918.694.452	84,66%	1.796.999.548
	EBA.994 Layanan Perkantoran	64.155.148.000	34.970.971.175	6.155.096.132	54.246.428.761	84,56%	9.908.719.239
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	644.400.000	1.050.080.640	0	644.400.000	100,00%	0
	EBB.951 Layanan Sarana Internal	644.400.000	1.050.080.640	0	644.400.000	100,00%	0
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	3.400.336.000	1.962.360.000	444.118.094	2.776.255.612	81,65%	624.080.388
	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	3.400.336.000	1.962.360.000	444.118.094	2.776.255.612	81,65%	624.080.388
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.135.887.000	8.443.577.196	1.627.031.557	10.504.313.966	69,40%	4.631.573.034
	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.778.583.000	3.229.150.596	468.904.057	4.131.760.971	71,50%	1.646.822.029
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	545.100.000	185.541.000	813.847.132	81,38%	186.152.868
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.962.000.000	1.069.486.200	132.826.840	1.356.038.845	69,12%	605.961.155
	EBD.965 Layanan Audit Internal	6.395.304.000	3.599.840.000	839.759.660	4.202.667.018	65,71%	2.192.636.982